

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Nur Fajar^{1*}, Muhammad Tahir², Abdi³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the role of the LPMD in accommodating community participation in development and what factors influence the role of the LPMD so that the village development of Balassuka Village, Buttono Pao district, Gowa Regency could be carried out properly. This study used qualitative with a descriptive approach. The Informants in this study were 10 people. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of this study indicated that the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) either as a facilitator was still less than optimal so that in achieving a more prosperous standard of living was very difficult, mediators had been carried out but not yet maximized so that community interest in participating in any development was still lacking. However, motivators and dynamists were still not maximized in order to facilitate community participation in the development of Balassuka Village. The factors that influenced the pran LPMD were age, education, and employment or income.

Keywords: *role of lpmd, balassuka village development, buttono pao district, gowa regency*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LPMD dalam mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran LPMD tersebut sehingga pembangunan desa Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dapat terlaksana dengan baik. Tipe penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) baik sebagai fasilitator masih kurang maksimal sehingga dalam meningkatkan atau mencapai taraf kemehidupan yang lebih sejahtera sangat susah, mediator sudah dijalankan hanya saja juga belum maksimal sehingga minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap pembangunan masih kurang, motivator dan dinamisor masih belum maksimal guna mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Balassuka masih perlu di tingkatkan dalam hal ini pengurus harus mampu memahami. Adapun faktor yang mempengaruhi pran LPMD tersebut adalah faktor usia, pendidikan, dan faktor pekerjaan atau penghasilan.

Kata Kunci: peran lpmd, pembangunan desa balassuka kecamatan tombolo pao kabupaten gowa

*nurfajar@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yang bertujuan untuk memberikan saran, melakukan pengendalian serta evaluasi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Namun sebelumnya, lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) harus dapat memantapkan kedudukan atau posisinya sebagai sebuah lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa dengan maksud untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan yang secara organisasi merupakan lembaga mandiri (berdiri sendiri) dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) tersebut, diharapkan agar dapat mengayomi berbagai kebutuhan masyarakat melalui pengendalian dan pengawasan terhadap fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh di wilayah desa.

Sebagaimana yang diketahui bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) merupakan

sebuah lembaga atau wadah yang terbentuk berdasarkan prakarsa masyarakat di tingkat desa yang memiliki kedudukan sebagai mitra dari pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Oleh karena itu, lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) harus senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat dan bukan menjadi alat yang dapat digunakan oleh pemerintah desa ketika terjadi permasalahan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan membenarkan tindakan tersebut.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) bertugas untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan berbagai swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi serta mengendalikan pembangunan yang dilaksanakan, karena tugas tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut.

Menurut Sari (2009), peran terkait tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Sedangkan menurut Abdulsyani (2012),

peranan merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Lebih lanjut menurut Soekanto (2006), peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Eko dalam Muhtarom (2016), menjelaskan bahwasanya pemberdayaan merupakan sebuah proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat Desa juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan

upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Balassuka.

Menurut Sumaryadi (2010), partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam berbagai proses pembangunan yang sedang dilaksanakan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan sumbangsih baik masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan menurut Djalal dan Supriadi (2001), partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahandan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Lebih lanjut menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011), partisipasi adalah adanya keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan mental, emosi dan fisik dengan menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta turut

mendukung tercapainya tujuan dan bertanggung jawab atas segala keterlibatan yang dilakukannya. Keterlibatan mental dan emosi dariseseorang di dalam situasi kelompok akan mampu mendorong mereka untuk menyokong pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Sedangkan menurut Isbandi (2007), partisipasi tidak lain merupakan keikutsertaan masyarakat di berbagai proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang terdapat dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan dilibatkannya masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Sundariningrum (2001), terdapat 2 (dua) macam partisipasi jika dilihat berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: (a) *Partisipasi langsung*, merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya; dan (b) *Partisipasi tidak*

langsung, merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Adapun menurut Plumer dalam Yulianti (2012), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah sebagai berikut; (a) *Pengetahuan dan keahlian*. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada; (b) *Pekerjaan masyarakat*. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antar komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi; (c) *Tingkat pendidikan dan buta huruf*. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada; (d) *Jenis kelamin*. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat

untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbedaterhadap suatu pokok permasalahan; dan (e) *Kepercayaan terhadap budaya tertentu*. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Menurut Maskun dalam Mulyadi (2009), menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun faktor pendukung tersebut seperti; (a) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (b) Merupakan kepentingan dan minat masyarakat; (c) Sesuai dengan adat istiadat masyarakat; dan (d) Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat menurut Rahardjo (2006), diantaranya; (a) Sikap masa bodoh, apatis dan juga sifat malas. Selain itu tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut; (b) Adanya makna-makna tipologi. Merupakan ciri fisik dari suatu wilayah, kedalaman, ketinggian, luas

wilayah atau bisa dikatakan sebagai kondisi dari suatu wilayah tertentu; (c) Dipengaruhi oleh letak geografisnya; (d) Jumlah Penduduk; dan (e) Keadaan ekonomi desa tersebut.

Menurut Slamet (2003), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu lembaga keswadayaanyang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengelola kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki tingkat kehidupan bersama di setiap desa/kelurahan, LPM dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan dalam menopang berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik dan meningkat. Sedangkan menurut Hikmat (2004), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu institusi atau lembaga masyarakat dalam mengembangkan keswadayaan masyarakat guna memacu kegiatan pembangunan desa, yang berbasaskan kemandirian, keswadayaan dan pemerataan.

Lebih lanjut menurut Rafsanjani, dkk (2013), menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Menurut Soemantri (2011), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong dengan masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Sedangkan menurut Setiawan (2016), menyebutkan bahwa tugas pokok dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebagai berikut; (a) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah; (b) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat; dan (c) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada di Desa.

Lebih lanjut Soemantri (2011), menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai fungsi; (a) Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan; (b) Penanaman dan

pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Dalam fungsi ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); (e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan (f) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahjudin dalam Nurman (2015), yang menjelaskan bahwa pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik yang berada pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa lebih

mengarahkan pemerintah daerah kepada pembangunan masyarakat (partisipasi dan pemberdayaan) dan bukan hanya bertumpu pada pembangunan fisik saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah ujian proposal. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Adapun alasan pemilihan lokasi di dasarkan atas: (1) LPMD merupakan mitra pemerintah desa yang memiliki tugas dan fungsi menyokong partisipasi aktif masyarakat; (2) LPMD merupakan wadah penyambung aspirasi terkait kebutuhan yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu terkait peran LPM Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Balassuka, aparat pemerintah Desa Balassuka, pengurus BPD Balassuka dan masyarakat sebagai objek dari

program pemberdayaan desa. orang dan teknik analisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta terdokumentasi sebagai pendukung dari penelitian. Data yang diperoleh dari lokasi adalah Yaitu data empiris yang didapatkan dari informan berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam. Adapun data yang dimaksud berupa data-data LPM di Desa Balassuka, bentuk partisipasi yang diterapkan oleh LPMD di Desa Balassuka dan data-data lain yang dianggap penting dalam penelitian ini.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Balassuka, aparat pemerintah Desa Balassuka, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara obyektif mengenai partisipasi LPM Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Dokumentasi yang dimaksud adalah segala bentuk informasi dan data yang dapat menunjang penelitian ini utamanya yang terkait dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di

Desa Balassuka Kecamatan Tombolo
Pao Kabupaten Gowa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat atau penduduk yang bermukim pada suatu wilayah (Desa /Kelurahan) sangat menentukan pengembangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan salah satu potensi paling besar yang dimiliki suatu oleh setiap daerah untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah. Seperti halnya dengan penduduk Desa Balassuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang sebagian besar penduduk atau masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa juga bertujuan untuk membantu kepala desa dalam mewujudkan harmonisasi hubungan antara anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dan aparat pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat desa guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, sejahtera, sehat, mandiri, dinamis dan maju berdasarkan kepastian hukum yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan, pendidikan dan berbagai kegiatan lainnya yang dianggap mampu mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia. Selain dari pada itu LPM juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan, mengawasi dan memanfaatkan hasil program pembangunan yang dijalankan. Keberadaan LPM juga harus mampu memberikan peluang kepada masyarakat dalam berpartisipasi di setiap program kerja yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan program kerja yang telah dilaksanakan. Maka sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, penulis mencoba memaparkan beberapa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Setidaknya penulis memaparkan beberapa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dianggap sangat penting dalam upaya mendorong dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa Balassuka yaitu sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator. Kesemua peran itu harus mampu dijalankan sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan pola hubungan yang baik dengan masyarakat serta mendorong dan ikut serta berpartisipasi dalam menyukseskan program-program pembangunan baik itu pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang di peruntukkan secara khusus masyarakat di Desa Balassuka.

Peran Fasilitator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator yang di maksud adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Balassuka mampu memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan yang di peruntukkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain dari pada itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Balassuka Juga harus mampu mendampingi dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Balassuka harus mampu sejalan dengan pemerintah terkait dengan program-program pembangunan yang akan di jalankan

sebagaimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalah mitra kerja pemerintah Desa Balassuka, (1) Kegiatan Pendampingan Masyarakat dimaksudkan agar program pemberdayaan masyarakat mampu berjalan searah dengan tujuan dengan pemerintah Desa Balassuka. Dengan melakukan pendampingan masyarakat maka pemerintah sangat terbantu dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan dengan mudah mengetahui kendala-kendala yang di hadapi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya. Serta masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan di laksanakan. Hal ini sudah sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang optimal dalam mengawal masyarakat terkait dengan rencana-rencana pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa termasuk perlu adanya peningkatan kualitas pengurus baik dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman serta kemampuan memahami lingkungan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPM) maka penulis yakin bahwa dalam pengawalan atau pendampingan masyarakat akan mudah di jalankan dengan memberikan pemahaman'- pemahaman yang bisa dipahami masyarakat awam pada umumnya dengan cara melakukan sosialisasi atau pelatihan dan selalu meyenggarakan rapat pertemuan dengan masyarakat guna membahas perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan selain dari pada itu hubungan emosional atau kekeluargaan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan masyarakat akan semakin baik, (2) Kegiatan memfasilitasi masyarakat maksudnya tidak jauh beda dengan pendampingan masyarakat yang artinya lembaga pemberdayaan masyarakat desa mampu memfasilitasi segala aktifitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan. Hal ini tentunya merupakan suatu yang harus di laksanakan LPM sebaik mungkin guna untuk mendorong minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan pembangunan yang telah di laksanakan. Hal ini sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, melihat bagaimana lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam memfasilitasi segala kebutuhan

masyarakat masih sangat kurang baik itu bentuk pengadaan rapat rutin atau kegiatan sosialisasi kegiatan program kerja yang akan di rencanakan maupun yang sudah dilaksanakan, lebih dari itu Lembaga pemberdayaan masyarakat desa sangat jarang melakukan kegiatan yang sifatnya membangun sumber daya manusia seperti pelatihan pendidikan guna menambah wawasan masyarakat dan minat dalam ikut serta dalam berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang sudah di laksanakan.

Peran Mediator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator dalam pembangunan maksudnya adalah untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari rencana pembangunan yang sudah di tetapkan dan akan dijadikan pembangunan jangka panjang maupun jangka panjang kepada warga masyarakat sehingga masyarakat paham terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan serta pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mampu menumbuhkan minat masyarakat dalam berpartisipasi di setiap program pembangunan yang akan di laksanakan.

Hal diatas sepadam dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang melihat bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat terkait perannya sebagai mediator dalam hal ini mensosialisasikan perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan masih kurang maksimal dan belum mampu memahami masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat sangat susah serta pembangunan yang dilaksanakan cenderung tidak di manfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Hal diatas sesuai dengan hasil observasi penulis selama dilapangan yang melihat bahwa lembag pemberdayaan masyarkat memang sudah turun kemasyarkat tapi hanya sebatas menyampaikan program perencanaan pembangunan kepada masyarakat tetapi melihat kondisi masyarakat yang pada umumnya masih awam terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan itu belum mampu secara maksimal di pahami oleh sebab itu untuk meningkatkan minat masyarkat dalam berpartisipasi sangat susah dalam proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pemanfaatan hasil.

Dari hasil penjelasan dari beberapa informan di atas maka penulis juga mengemukakan teori dari Muhtarom (2016) terkait peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai Mediator yang mengemukakan bahwa LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulanrencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah danrancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemenmasyarakat. LPM Desa mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarahpembangunan melalui sosialisasikerumah-rumah warga Desa danjuga melalui bentuk undangan rapat. Maka penulis dapat menyimpulakn bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarkat sebagai mediator belum sepenuhnya mampu dijalankan dengan baik sebagaimana bisa terjun langsung kemasyarkat dalam mensosialisasikan perencanaan program perencanaan pembangunan serta mampu terjun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang yang terjadi di maksyarkat dengan meberikan solusi atau jalan keluar terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Peran Motivator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator maksudnya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) harus mampu mendorong masyarakat yang ada di Desa untuk mampu melakukan apa yang mereka bisa lakukan dalam upaya peningkatan kreatifitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga harus mampu tampil memberikan masukan atau pandangan yang lebih kreatif untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan serta mampu menciptakan kemandirian masyarakat dan mampu memberikan solusi terkait dengan masalah atau keluhan masyarakat.

Dari hasil wawancara di sesuai dengan pengamatan penulis pada saat observasi dilapangan yang melihat bahwa kondisi lingkungan dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berpartisipasi maka dari itu setiap pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu memahami hal tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain dari pada itu pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat juga harus

massif dalam melakukan sosialisasi atau rapat rutin guna untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap pembangunan, kemudian dalam peningkatan mutu sumber daya manusia lembaga pemberdayaan masyarakat juga harus selalu melakukan pembimbingan terhadap masyarakat baik itu pelatihan, pendidikan karakter masyarakat dan lain sebagainya yang dianggap mampu meningkatkan mutu dan taraf kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta akan mampu membangun hubungan emosional yang baik antara pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat kita ketahui bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai motivator dalam melakukan bimbingan, pembinaan dan pengarahan belum bisa dijalankan sebagaimana dalam upaya meningkatkan dan mendorong minat masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi di setiap pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan dalam hal ini perawatan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Padahal menurut hemat penulis pada saat melakukan observasi

dilapangan kegiatan pembimbingan, pembinaan dan pengarahannya sangat perlu dilaksanakan sebaik mungkin guna untuk menambah wawasan masyarakat terkait dengan program-program pembangunan ataupun menyangkut hal-hal lain yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri.

Terkait hasil penjelasan dari beberapa informan atas terkait dengan peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai motifator tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhtarom (2016) mengatakan bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selaludinamis, menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisalangsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa, maka Kepala Desa atau pekon, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), serta Lembaga Kemasyarakatan diamanatkan dalam undang-undang agar dapat bekerjasama dan saling berhubungan dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga tujuan agar setiap desa mempunyai kemampuan untuk mengurus segala urusan desa sendiri secara otonom sehingga dapat terciptanya kemandirian desa atau pekon dapat tercapai.

Peran Dinamisator

Peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai Dinamisator adalah Mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LPM seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai kegiatan kegiatan serta program yang ada di lingkungan masyarakat. Selain harus bijaksana pemantauan kegiatan masyarakat, LPM juga diharapkan untuk bisamenempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam program-program yang dibuat oleh LPM.

Dari penjelasan diatas penulis juga menemukan hal yang serupa selama melakukan observasi awal dilapangan yang melihat bahwa masyarakat sangat perlu dorongan dari

lembaga pemberdayaan masyarakat untuk bisa ikut serta dan aktif dalam setiap pembangunan. Maka dari itu lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu melakukan pendampingan terhadap masyarakat dengan cara terjun langsung kesetiap kalangan masyarakat dan memberikan pelatihan baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahtraan serta memberikan solusi disetiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat akan merasa diperhatikan dan akan mendorong serta meningkatkan untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan.

Adapun beberapa faktor penghambat yang di temukan penulis dalam pengamatan sebelumnya selama dilapangandalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu di antaranya faktor usia, pendidikan serta pekerjaan dan penghasilan. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Balassuka. Maka untuk mengetahui sejauhmana pengaruh faktor diatas dalam menjalankan tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, penulis akan memaparkan ketiga faktor tersebut dari hasil

wawancara yang sudah dilakukan yaitu (1) Faktor Usia dalam Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) maksudnya adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usialainnya, (2) Faktor pendidikan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Maksudnya bahwa pengurus LPM yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mampu untuk menganalisa dan menelaah setiap perubahan yang terjadi serta mampu memberikan solusi yang lebih inovatif bila dibandingkan dengan pengurus LPM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Dari penjelasan kedua informan diatas maka dapat di ketahui beberapa kendala lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa Balassuka yaitu faktor pekerjaan dan penghasilan yang pengurus yang masih kurang sehingga lebih memilih menjalankan pekerjaan pribadinya yang anggap lebih menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhab hidupnya

kemudian dari faktor usia banyak pengurus yang sudah memasuki lanjut usia yang sudah pasti kondisi fisik tidak sama dengan yang memiliki usia menengah sehingga dalam melakukan pengawaklan terhadap masyarakat itu kurang optimal serta faktor pendidikan terkadang pentingnya yang dimana beberapa pengurus memiliki tingkat pendidikan yang terbilang masih rendah sehingga tidak mampu memberikan inovasi dan kurangnya kreatifitas yang membuat masyarakat tidak aktif berpartisipasi di setiap program kerja yang di laksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terkait dengan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut : (1) Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai fasilitator terkait dengan memberikan fasilitas dan mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan itu masih kurang maksimal sehingga dalam meningkatkan atau mencapai taraf kehidupan yang lebih sejahtera sangat

susah, (2) Peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator terkait dengan mensosialisasikan hasil-hasil usulan pembangunan sudah dijalankan hanya saja juga belum maksimal sehingga minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap pembangunan masih kurang, (2) Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai motivator masih perlu di tingkatkan dalam hal ini pengurus harus mampu memahami lingkungan dan keadaan sosial masyarakat sehingga bisa menjalin hubungan emosional yang baik dan masyarakat dengan hal itu juga masyarakat akan merasa diperhatikan dan akan menambah minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang di rencanakan maupun yang di laksanakan, (3) Peran Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai dinamisor, dalam hal ini lembaga pemberdayaan Masyarakat masih kurang dalam bersentuhan langsung kepada masyarakat sehingga dalam mendorong masyarakat untuk berperan aktif belum bisa tercapai.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peran Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Balassuka yaitu sebagai berikut: (1) Faktor usia, dalam kepemimpinan lembaga pemberdayaan masyarakat desa Balassuka rata-rata memasuki usia

lanjut yang yang tentunya sangat beda dengan kondisi pengurus dengan umur menengah keatas selain tenaga yang semakin kurang juga tingkat kreatifitasnya juga akan berkurang seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini, (2) Faktor pendidikan, dalam hal ini pendidikan sangatlah penting tetapi kebanyakan pengurus memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, (3) Faktor pekerjaan dan penghasilan menjadi salah satu kendala pengurus untuk aktif dalam mendampingi masyarakat karena pengurus cenderung lebih memilih pekerjaan pribadinya yang dianggap lebih menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita: Yogyakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Effendi, Irwan. 2007. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Program Pemberdayaan*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Effendi, Yuedra. *Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Sumber: <http://bitra.or.id>.
- Di akses pada tanggal 28 Mei 2019, pada pukul 22.08 Wita.
- Erawati, Intan dan Mussadun. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono Kecamatan Sayung*. Jurnal Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Volume 1 Nomor 1.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Humaniora Utama Press: Bandung.
- Muhtarom, Abid. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Islam Lamongan. Volume 1 Nomor 3.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Nadi Pustaka: Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Rahmawati, Arini Ayu. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Risyanti, Roesmidi Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprint: Sumedang.

- Sari, Dewi Wulan. 2009. *Sosiologi: Konsep dan Teori*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Slamet, Y. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Sebelas Maret University Press: Surakarta.
- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sundariningrum. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta..
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama: Jakarta.